

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan suatu unsur yang dapat diwujudkan dengan pembangunan kesehatan besar yang mana artinya pembinaan sumber daya manusia merupakan modal pelaksanaan pembangunan nasional, yang memperhatikan peran kesehatan serta pembinaan penyelenggaraan dalam upaya kesehatan. Upaya pembangunan kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya yakni pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dan adanya penyediaan jumlah obat yang cukup, bermutu serta terdistribusi merata dengan harga yang terjangkau dapat mendukung optimalnya bentuk pelayanan kesehatan. Salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan yaitu apotek (Presiden RI, 2009)

Apotek merupakan tempat pelayanan bidang kesehatan di Indonesia khususnya dalam melakukan praktik kefarmasian. Dalam Permenkes No.73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan penunjang kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam penggunaan alat kesehatan dan obat-obatan. Penggunaan obat tidak bisa dipisahkan dari faktor yang mendukung kesehatan manusia (Menkes RI, 2016).

Pengelolaan perbekalan farmasi merupakan suatu siklus kegiatan, dimulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, penghapusan, administrasi dan pelaporan serta evaluasi. Pengelolaan kefarmasian meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan serta pendistribusian kepada masyarakat. Salah satu prioritas bagian pelayanan kefarmasian adalah pengelolaan perbekalan farmasi meliputi obat, bahan obat serta alat kesehatan. Oleh karena itu penerapan pengelolaan penyimpanan

persediaan obat menjadi hal yang sangat penting guna menunjang pelayanan kefarmasian yang optimal. Salah satu aspek penting dalam siklus pengelolaan perbekalan farmasi adalah penyimpanan dengan tujuan menjamin mutu sediaan dan terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia. Penyimpanan obat merupakan kegiatan pemeliharaan serta menyimpan dengan menempatkan obat yang diterima pada tempat yang aman dari pencurian. Penyimpanan yang baik dapat menjadi faktor penentu mutu obat (Karlida dan Ida, 2017).

Ketidaktepatan dalam prosedur atau kondisi penyimpanan dapat berakibat pada ketidakefektifan obat bahkan hingga menyebabkan kerusakan maupun kehilangan obat yang dapat menyebabkan kerugian bagi pasien sehingga pasien tidak dapat terlayani dengan optimal karena tidak mendapatkan obat sesuai yang diharapkan, begitu pula untuk pengelola apotek. Ketersediaan perbekalan farmasi khususnya obat-obatan merupakan bagian penting dalam pelayanan kefarmasian yang tidak dapat dipisahkan, sehingga apabila ditemukan kesalahan dalam prosedur penyimpanan akan berpengaruh pada kualitas pelayanan kefarmasian di apotek (Ardinigtas, dkk., 2019).

Penyimpanan perbekalan kefarmasian diatur dalam Permenkes RI No.73 tahun 2016 dan dijelaskan bahwa jenis perbekalan yang farmasi meliputi obat dan alat kesehatan yang memiliki tampilan serta penamaan serupa (*LASA=Look Alike Sound Alike*) tidak ditempatkan berdekatan serta diberikan label atau penandaan khusus, sehingga kesalahan dalam pengambilan tidak terjadi. Berdasarkan Permenkes RI No.73 tahun 2016 juga menyebutkan bahwa jenis dan bentuk sediaan obat disusun memakai sistem FIFO (*First Expired First Out*) dan FEFO (*First In First Out*) untuk meminimalkan adanya kerusakan serta hilangnya jenis obat. Pada peraturan ini dijelaskan juga bahwa penyimpanan obat harus disusun berdasarkan alfabetis sehingga memudahkan dalam pengawasan serta pencarian jenis obat ketika dalam proses distribusi ke konsumen (Menkes RI, 2016).

Faktor yang mendukung dalam pengelolaan mutu obat khususnya penyimpanan obat adalah hasil evaluasi pada sistem penyimpanan obat dengan standar pelayanan kefarmasian di Apotek. Dalam Permenkes RI No. 73 tahun 2016 dijelaskan bahwa sistem penyimpanan harus memperhatikan penyusunan dan pengeluaran obat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ardinigtas, dkk (2019) faktor yang dapat menyebabkan kesalahan dalam pengelolaan perbekalan kefarmasian adalah kesalahan pada proses penyimpanan (54,84%). Oleh karena

itu evaluasi sistem penyimpanan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan perbekalan kefarmasian di Apotek (Ardiningtyas, dkk., 2019).

Apotek Kimia Farma adalah salah satu anak perusahaan yang dibentuk oleh PT. Kimia Farma dan merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang berperan pada sarana pelayanan kesehatan dan melakukan pengelolaan perbekalan di bidang farmasi. Pada survey awal diperoleh hasil bahwa di Apotek Kimia Farma GKB tampak sebagian obat pada rak penyimpanan obat belum menerapkan sistem FIFO (*First In First Out*) dan FEFO (*First Expired First Out*) seperti standar pelayanan kefarmasian di Apotek menurut Permenkes RI No. 73 tahun 2016. Berdasarkan pentingnya dampak penyimpanan obat pada suatu apotek, maka perlu dilakukan studi lebih lanjut tentang tata cara penyimpanan obat di Apotek Kimia Farma GKB Gresik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
“Bagaimana evaluasi sistem penyimpanan obat di Apotek Kimia Farma GKB Gresik berdasarkan Permenkes RI No.73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek?”

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah:
“Penulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem penyimpanan obat di Apotek Kimia Farma GKB Gresik berdasarkan Permenkes RI No.73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.”

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat penelitian adalah:

1. Bagi Penulis

Dapat melakukan evaluasi sistem penyimpanan obat di apotek.

2. Bagi Institusi Pendidikan Tinggi Farmasi

Untuk menambah pengetahuan aplikatif tentang pengelolaan perbekalan farmasi khususnya sistem penyimpanan obat di apotek.

3. Bagi Apotek

Sebagai bahan evaluasi apotek dalam tahap sistem penyimpanan obat.

4. Bagi Peneliti Lainnya

Sebagai referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis.